

## **Keuangan Mikro Syariah Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Menyelaraskan Prinsip Dengan Praktik**

Ayu Nadia Putri<sup>1</sup>, Anisa Apriani<sup>2</sup>, M. Andhika Fajar Ardiansyah<sup>3</sup>, R.A Anisa Asiillah<sup>4</sup>, Anisa Solihah<sup>5</sup>, Dea Okta Viana Sari<sup>6</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang<sup>1234</sup>, IAIN Kudus<sup>5</sup>, Universitas Sriwijaya<sup>6</sup>

Corresponding email: anisaaprn13@gmail.com

### **ARTICLE INFO**

#### **Article History**

Submission : 22-04-2024

Received : 23-05-2024

Revised : 29-05-2024

Accepted : 12-06-2024

#### **Keywords**

Development

Microfinance

Sustainable

### **ABSTRACT**

In February 2018, growth of financing by 52.9 percent. Islamic microfinance institutions have a role in increasing people's economic income. The goal sustainable development or commonly called Sustainable Development Goals (SDGs), its have 17 goals achieved until 2030. Goals is bring prosperity all levels society. It is line with existence Islamic microfinance institutions to improve standard living and public welfare. Type this paper is qualitative method, used is qualitative descriptive analysis,describesgrowth Islamic microfinance institutions BPRS and BMT institutions. Describes SDGs have objective conformity with BPRS and BMT. Results this paper indicate growth Islamic microfinance institutions, where there are component BPRS grow 10 percent. Results show are financing aspects grow 17.1 percent. BMT financial ratio remaining operating grew by 403.5 percent. Study provides information that Islamic financial institutions are accordance with achievement program SGD's related increasing income and economic activities can realized with presence welfare. Form role sharia financial institutions, easy access capital and socialization introduction financial investment.

### **ABSTRAK**

Pada Februari 2018, pertumbuhan pembiayaan sebesar 52,9 persen. Lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang biasa disebut Sustainable Development Goals (SDGs), memiliki 17 tujuan yang ingin dicapai hingga tahun 2030. Tujuan tersebut adalah menyajahterakan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan keberadaan lembaga keuangan mikro syariah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang menggambarkan pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah BPRS dan BMT. Mendeskripsikan kesesuaian tujuan SDGs dengan BPRS dan BMT. Hasil penelitian ini menunjukkan pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah, dimana terdapat komponen BPRS tumbuh 10 persen. Hasil penelitian menunjukkan aspek pembiayaan tumbuh 17,1 persen. Rasio keuangan BMT yang masih beroperasi tumbuh sebesar 403,5 persen. Penelitian memberikan informasi bahwa lembaga keuangan syariah sesuai dengan program pencapaian pemerintah daerah terkait peningkatan pendapatan dan kegiatan ekonomi dapat terwujud dengan adanya

kesejahteraan. Bentuk peran lembaga keuangan syariah, kemudahan akses permodalan dan sosialisasi pengenalan keuangan syariah, serta kemudahan dalam melakukan investasi.

## Introduction

Pada dasarnya semua orang ingin bahagia sepanjang waktu di dunia ini, baik secara materi, rohani, jasmani, dan sosial. Namun pada kenyataannya, multitasking ini dibatasi oleh terbatasnya kemampuan manusia dalam memahami dan menafsirkan kebutuhannya, keterbatasan membandingkan situasi di dunia, dan terbatasnya jumlah sumber daya yang tersedia untuk mencapai kebahagiaan tersebut sangat sulit dicapai. Faktor ekonomi merupakan salah satu aspek kehidupan yang diharapkan masyarakat untuk mencapai tujuan hidupnya (P3EI UII, 2008). Syariah Islam membekali siswanya dengan prinsip-prinsip dasar perilaku ekonomi individu untuk mencapai tujuan secara keseluruhan. (maqashid alsyariah), yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat. Di sana, Islam memberikan peluang besar bagi para ilmuwan untuk melakukan penelitian mendalam dan penting di banyak bidang, termasuk kajian ekonomi Islam, dan memilih strategi yang tepat di bidang pembangunan ekonomi dan sosial. Syariat Islam jelas memberikan tempat konteks (ijtihad) tanpa melakukan pelanggaran. Tujuan kajian ini adalah menjadikan Islam bermanfaat (Islam empiris). Khasana Islam memberikan kesempatan kepada para ulama Islam untuk melakukan penelitian mendalam guna mengembangkan ilmu keislaman yang bermanfaat (Minarni, 2015).

Dalam perspektif Islam, kehidupan manusia dan alam tidak dapat dipisahkan. (Gita, 2006)

1. Naluri mempertahankan diri (ghorizatul baqa) Naluri mempertahankan diri seumur hidup diberikan Tuhan kepada seluruh makhluk hidup termasuk manusia.
2. Naluri reproduksi (ghorizatun nau') Naluri reproduksi, seperti halnya mempertahankan diri, dianugerahkan Tuhan kepada semua makhluk hidup.
3. Iman (ghhorizatun taddayun) Ritual ibadah hanya diberikan kepada makhluk Tuhan, artinya manusia, yang terbaik di muka bumi. Itu tandanya masyarakat mempunyai kebiasaan beragama, ketika muncul situasi buruk dalam pikirannya, mereka berkata dalam hati bahwa ada kekuatan di bumi ini dan mencari perlindungan darinya, yaitu ekonomi Islam. Islam itu berdasarkan agama, sehingga merupakan bagian yang hakiki dan tidak terpisahkan dari agama Islam

Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba (bunga), keadilan, dan transparansi. Tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan fokus pada pertumbuhan yang inklusif, pemerataan, dan perlindungan lingkungan untuk generasi mendatang. Integrasi keuangan syariah dengan pembangunan berkelanjutan dapat

meningkatkan keadilan sosial, mempromosikan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup. Serta bagaimana cara kita untuk menyelaraskan antara praktik dan prinsip yang telah ada.

Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 9 Oktober 2016: Ketua Dewan Komisiner OJK Muliawan D. Hadad menyebutkan bahwa Keuangan Syariah bisa menjadi salah satu solusi dunia dalam mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). "Prinsip-prinsip khas keuangan syariah yang memihak pada pemerataan pendapatan dan berorientasi pada kegiatan sosial lingkungan, menjadikan pengembangan sistem keuangan syariah menjadi sangat relevan dengan pencapaian target-target SDGs,"

Keuangan syariah, juga tidak hanya bisa menjangkau aspek pemberantasan kemiskinan tetapi juga mencakup peningkatan kesehatan, penyediaan pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi,antisipasi perubahan iklim dan juga penurunan tingkat ketimpangan tingkat pendapatan. OJK sebagai otoritas sektor jasa keuangan di Indonesia terus mendorong perkembangan sektor keuangan syariah mulai dari sektor perbankan syariah, IKNB syariah dan pasar modal syariah.

Share industri perbankan syariah terhadap industri perbankan nasional menunjukkan kenaikan bila dibandingkan tahun sebelumnya, meningkat dari 4,60% di Juli 2015 menjadi 4,81% di Juli 2016. *Share* dimaksud diperkirakan akan mencapai sekitar 5,13% apabila turut memperhitungkan hasil konversi BPD Aceh menjadi Bank Umum Syariah. Sejalan dengan perkembangan *share* tersebut, terjadi kenaikan aset perbankan syariah (BUS dan UUS) sebesar 18,49% (YOY), dari Rp 272,6 triliun (Juli 2015) menjadi Rp 305,5 triliun (Juli 2016). Kenaikan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya penghimpunan dana pihak ketiga sebesar 12,54% (YOY), dari Rp 216 triliun (Juli 2015) menjadi Rp 243 triliun (Juli 2016) yang selanjutnya telah mendorong penyaluran pembiayaan tumbuh sebesar 7,47% (YOY), dari Rp 204,8 triliun (Juli 2015) menjadi Rp 220,1 triliun.

Dari sisi kualitas pembiayaan, NPF gross mengalami penurunan (YOY) dari 4,89% (Juli 2015) menjadi 4,81% (Juli 2016). Sementara profitabilitas yang tercermin dari rasio ROA meningkat dari 0,91% (Juli 2015) menjadi 1,06% (Juli 2016). Sedangkan rasio BOPO membaik dari 94,19% (Juli 2015) menjadi 92,78% (Juli 2016). Selain itu, terjadi peningkatan kecukupan permodalan perbankan syariah yang tercermin dari kenaikan rasio CAR, yaitu dari 14,47% (Juli 2015) menjadi 14,86% (Juli 2016).

Sementara untuk pasar modal syariah, persentase nilai masing-masing efek syariah dari total efek per 23 September 2016 adalah sebagai berikut, saham syariah sebesar 55,97%, sukuk korporasi sebesar 3,88%, reksa dana syariah sebesar 3,76% dan sukuk negara sebesar 15,08%.

Sedangkan perkembangan industri keuangan non bank (IKNB) Syariah sampai Juli 2016, total aset IKNB Syariah meningkat sebesar 23,18% menjadi Rp 80,1 triliun. Pertumbuhan aset didominasi oleh penambahan pelaku usaha serta pengembangan produk dan layanan IKNB Syariah. Sementara itu, sukuk Indonesia di lingkup global telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan yang mencapai sekitar 23,3%, atau sekitar USD 10,15 miliar dari total penerbitan *sovereign* sukuk internasional. Indonesia juga Negara pertama yang memiliki sukuk retail. Pasar modal syariah juga bisa berperan signifikan dalam membantu pembiayaan proyek-proyek infrastruktur pemerintah, terutama melalui pengembangan pasar sukuk. Konflik politik dan bencana alam akhir-akhir ini mengakibatkan 1 miliar populasi dunia masih berada pada jurang kemiskinan; 1,1 miliar penduduk dunia hidup tanpa listrik; dan 2,5 miliar penduduk tanpa sanitasi yang layak. Lebih lanjut lagi, sebagian dari populasi tersebut berada di negara dengan mayoritas penduduk muslim dengan Indonesia menyumbang sekitar 28 juta orang penduduk miskin dunia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keuangan syariah menjadi solusi pembangunan berkelanjutan, serta bagaimana cara kita untuk menyelaraskan prinsip dengan praktik – praktik yang akan dilakukan nantinya apakah sesuai dengan prinsip kita atau menyimpang. Namun yang diinginkan adalah selaras dengan prinsip maupun praktiknya. Meneliti keuangan syariah memiliki manfaat yang luas, seperti menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Ini juga membantu mempromosikan inklusi keuangan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, keuangan syariah mendukung pencapaian berbagai target, seperti mengurangi ketimpangan, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan menjaga lingkungan hidup yang sehat. Dengan fokus pada prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etis, keuangan syariah berperan dalam mempercepat perjalanan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

## Method

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang artinya menggambarkan suatu subyek penelitian. Dalam hal ini adalah pertumbuhan BPRS dan BMT di Indonesia, Kemudian desain peran dari kedua lembaga keuangan mikro syariah tersebut dalam pencapaian sustainable development Goals (SDGs). Konsep keuangan syariah yang sejalan dengan tujuan SDGs. Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (objek penelitian), sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diambil peneliti sebagai pendukung atas penelitian secara ilmiah yaitu dengan melakukan studi pustaka (penelusuran melalui buku, artikel, jurnal, majalah, internet dan sumber lainnya). (Farizal. 2010).

Diantaranya data yang diperoleh dari Otoritas Jasa keuangan dan sumber data lainnya. Batasan dalam tulisan ini difokuskan pada perkembangan BPRS dan BMT di Indonesia, serta pola SDGs. Keduanya sejalan dalam mencapai tujuan untuk kesejahteraan. Dengan menyesuaikan pola dari lembaga keuangan mikro syariah BPRS dan BMT dalam kegiatannya mendukung dan sejalan dengan SDGs yang terus dicanangkan Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan perkembangan dari BPRS dan BMT, serta menguraikan konsep Sustainable Development Goals (SDGs) yang saat ini terus diupayakan oleh pemerintah. Kemudian tujuan dari SDGs yang sejalan dengan tujuan dari lembaga keuangan mikro syariah. Keberadaan lembaga keuangan syariah memiliki peran yang kuat dalam pencapaian SDGs. BPRS dan BMT sejalan dengan tujuan SDGs.

## Results and Discussion

Keuangan mikro syariah merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia, yang bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Layanan ini mencakup pembiayaan, tabungan, dan berbagai produk keuangan lainnya yang dirancang untuk memfasilitasi inklusi keuangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat.

Keuangan mikro syariah memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi mikro dan UKM. Sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja. Keuangan mikro syariah menawarkan pembiayaan yang mudah diakses dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga memudahkan pelaku usaha kecil untuk memperoleh modal tanpa harus berurusan dengan bunga yang memberatkan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), produk-produk pembiayaan seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kemitraan) sering digunakan untuk mendukung usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, keuangan mikro syariah tidak hanya memberikan modal tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Keuangan mikro syariah juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Banyak masyarakat, terutama di pedesaan dan daerah terpencil, tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional. Keuangan mikro syariah hadir untuk menjangkau kelompok-kelompok ini dengan menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses dan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang mereka anut. Bank Indonesia mencatat bahwa peningkatan inklusi keuangan melalui keuangan mikro syariah telah membantu lebih banyak masyarakat untuk menabung, memperoleh pembiayaan, dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.

Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Keuangan mikro syariah memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal

Dengan memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha di daerah, sektor ini membantu menggerakkan roda ekonomi setempat. Usaha-usaha kecil dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, lembaga keuangan mikro syariah sering kali bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga lainnya untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi lokal. Misalnya, program pelatihan kewirausahaan dan pengembangan kapasitas usaha yang diberikan kepada masyarakat. Sinergi ini menciptakan dampak yang lebih luas dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Salah satu peran penting lainnya dari keuangan mikro syariah adalah dalam edukasi dan literasi keuangan. Lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya memberikan layanan keuangan, tetapi juga edukasi tentang bagaimana mengelola keuangan dengan bijak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk memberikan pelatihan tentang pencatatan keuangan, perencanaan bisnis, dan manajemen risiko. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), edukasi keuangan yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro syariah sangat penting untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, terutama mereka yang belum terbiasa dengan sistem perbankan. Dengan meningkatnya literasi keuangan, masyarakat dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti pinjaman berbunga tinggi dari rentenir.

Keuangan mikro syariah memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi mikro dan UKM, peningkatan inklusi keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan edukasi keuangan, keuangan mikro syariah membantu menciptakan perekonomian yang lebih inklusif dan berkeadilan. Keberadaannya memberikan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai syariah bagi masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan yang aman dan terpercaya.

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) secara formal telah disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah. LKMS memiliki beberapa keunggulan, seperti tidak menerapkan sistem ribawi, bersifat sosial bisnis, dan dapat menciptakan produk keuangan yang inovatif untuk keperluan usaha kaum perempuan. Dalam kajian ini, kita juga akan membahas peran LKMS sebagai pusat pembelajaran bagi nasabahnya, yakni dengan memberikan pendampingan dalam administrasi keuangan usaha dan mensosialisasikan pemahaman tentang ekonomi Islam (Suharto, 2024).

Selain itu peran yang sangat penting dalam mengembangkan usaha kecil masyarakat. LKMS memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta dapat menciptakan produk keuangan yang inovatif untuk keperluan usaha kaum perempuan. Dengan demikian, LKMS dapat berperan sebagai pusat pembelajaran bagi nasabahnya, serta membantu mengentaskan kemiskinan di masyarakat.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki peran yang sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Dalam kajian ini, kita akan membahas bagaimana LKMS relevan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam mengentaskan kemiskinan.

LKMS adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memiliki tujuan utama dalam memberikan kredit dan jasa lainnya bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. LKMS telah menunjukkan potensi besar dalam mengentaskan kemiskinan, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Jumlah pasti BMT tidak diketahui karena sebagian besar tidak terdaftar dan beroperasi secara informal, sementara sebagian lainnya terdaftar sebagai koperasi. Perkiraan tidak resmi menyebutkan jumlahnya 4.500 hingga 5.500 di seluruh Indonesia. Namun BMT yang terdaftar sebagai koperasi (belum diatur undang-undang) berjumlah 1.197 Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan 2.163 Unit Usaha Syariah pada akhir tahun 2014. Informasi diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil dan Menengah. (Bapenas, Rencana Induk. 2015).

Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Untuk Sustainable Development Goals (SDGs) Usaha mikro BPRS dan BMT syariah memiliki model dan karakteristik yang berbeda dengan bank umum syariah dan unit usaha syariah. BPRS dan BMT belum memiliki produk yang menawarkan layanan cross exchange kepada nasabah. Tanpa kartu ATM, tanpa rekening giro, tanpa cek atau transfer kawat, pertemuan antara konsumen dan dunia usaha menjadi lebih kuat. Apabila nasabah memilih menyeter di BPRS dan BMT, nasabah dapat mendatangi kantor untuk menarik uangnya. Seperti halnya di bank, jika nasabah memutuskan untuk mengambil pinjaman pada waktu tertentu sebaiknya membayar tagihan bank di kantor.

Minimnya peluang cross-marketing menunjukkan bahwa BPRS dan BMT memerlukan banyak pertemuan dengan nasabah, kerjasama dengan mitra usaha dan desain serta model kolaboratif yang penting bagi BPRS dan BMT untuk menjangkau dan mengakuisisi lebih banyak nasabah. Hakikat kedua lembaga keuangan mikro syariah, BPRS dan BMT, adalah partisipasi pasar pada sektor masyarakat paling bawah, memberikan akses keuangan kepada kelas menengah. Sebuah layanan keuangan bagi mereka yang tidak mempunyai rekening bank. Tujuan inklusi keuangan bagi masyarakat kelas bawah adalah untuk menjamin seluruh sektor masyarakat dapat hidup. Kekayaan dapat beredar di semua tingkat perekonomian, termasuk perekonomian mikro, kecil, dan besar. Selain itu, tujuannya adalah untuk membuat masyarakat lebih sejahtera secara

keseluruhan. Lembaga keuangan syariah diminta untuk terus memberikan layanan keuangan kepada masyarakat kurang mampu sehingga masyarakat dapat merasakan harapan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Tujuan utama yang ingin dicapai. Kesejahteraan ekonomi merupakan bagian dari tujuan SDGs yang ingin dicapai pada tahun 2030. Untuk mencapai tujuan tersebut, banyak pihak yang terlibat dalam pencapaiannya, dan salah satu lembaga terkait yang terkait dengan tujuan SDGs tersebut adalah lembaga keuangan mikro syariah.

Keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu memberikan penghidupan kepada masyarakat. SDGs juga bertujuan untuk memastikan pemerataan perekonomian dan kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang menyediakan akses langsung terhadap layanan keuangan bagi masyarakat kurang mampu. Lembaga keuangan mikro memainkan peran penting dalam mencapai SDGs. setiap orang Peran lembaga keuangan mikro syariah dalam mencapai SDGs adalah memberikan modal usaha kepada usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan taraf perekonomian seluruh masyarakat. Dengan demikian, akan tersedia akses layanan berkualitas bagi setiap orang yang ingin mengakses produk keuangan, termasuk penawaran produk investasi. Lembaga keuangan mikro syariah harus menyadari dan memperkenalkan jenis investasi ini kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh pendapatan tambahan dan meningkatkan manfaat ekonomi.

Maka relevansi dari keuangan mikro syariah dengan SDGs memiliki peran sebagai Pemberdayaan Masyarakat: LKMS dapat berperan sebagai lembaga yang memberikan dukungan keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Dengan demikian, LKMS dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan (Andri, 2018). Selain itu pengentasan kemiskinan: LKMS dapat berperan dalam mengentaskan kemiskinan dengan memberikan kredit dan jasa lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. LKMS juga dapat berperan dalam meningkatkan kapasitas pengelola LKM, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan usaha kecil (Endang, 2020). Peningkatan Capacity Building: LKMS dapat berperan dalam meningkatkan capacity building bagi pengelola LKM, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha kecil dan mengurangi kemiskinan (Iiz, 2021)

## Conclusion

Pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah dalam hal ini adalah BPRS dan BMT pada periode desember 2018 mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Beberapa komponen di BPRS mengalami pertumbuhan diatas 10 persen. Pertumbuhan terbesar pada komponen pembiayaan yang tumbuh sebesar 17,1 persen atau sebesar 9.084.467.000.000. Adapun BMT juga mengalami pertumbuhan yang baik, pertumbuhan terbesar pada komponen sisa hasil usaha yaitu sebesar 403,5 persen. Sedangkan komponen cadangan mengalami penurunan sebesar -13,2 persen. Bentuk peran lembaga keuangan mikro syariah bagi pencapaian tujuan dari Sustainable Goals yaitu BPRS dan BMT memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat bawah, dalam tujuan bukan sekedar untuk

memberikan layanan keuangan tetapi juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Melalui pemberian modal kepada usaha kecil dan menengah diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan, pendapatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Lembaga keuangan syariah dan SDGs memiliki kesamaan tujuan untuk hadir mensejahterakan masyarakat, melalui layanan keuangan dan produk lembaga keuangan mikro syariah bisa mewujudkan tujuan SDGs yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat dan memberi kesejahteraan. Melalui lembaga keuangan mikro syariah masyarakat bisa memperoleh modal usaha, dan menikmati produk-produk yang bisa menambah pendapatan seperti investasi.

### References

- Andri Soemitra. 2018, *Peran Pemberdayaan Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs)*. FEBI UIN-SU Press.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) di INDONESIA. Jakarta: Badan Pusat Statistik/Statistics Indonesia.
- Bappenas. 2015. Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia. Jakarta: Bappenas.
- Danupranata, Gita. 2006. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UPFE-UMY.
- Daulay, Raihanah. 2016. *Pengembangan Usaha Mikro Untuk Perbedayaan Ekonomi Ummat Islam*.
- Endang Kusumah Ayu, 2020. *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2015-2019)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Iiz Izmuddin dan Awaluddin. 2021. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Analisis Sustainability Development Goals*. Wade Group Publish.
- Kota Medan. *Jurnal MIQOT* Vol. XL No. 1 Januari-Juni 2016. Medan: UIN Sumatra Utara.
- Fardan, Ngoyo. 2015. Mengawal Sustainable Development Goals(SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan. *Jurnal Sosioreligius* Volume I No. 1 Juni 2015. Makassar:
- Prodi Sosiologi Agama, Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar.
- Farizal. 2010. *Pengembangan Kompetensi SDM Perbankan Syariah Melalui Corporate University*. Forum Riset Perbankan Syariah II. Yogyakarta: UMY.

Suharto, "Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Masyarakat." Badilag.mahkamahagung.go.id, 2024.

Trimulato, dan Nuringsih. Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro Syariah <http://mysharing.co/sdgs-sesuai-dengan-keuangan-syariah/> , Diakses Tanggal 9 Maret 2019.

<https://www.republika.co.id/berita/koran/syariah-koran/16/10/12/oexlx62-keuangan-syariah-solusitarget-sdgs> , Diakses tanggal 10 Maret 2019.

<https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu>, Diakses pada tanggal 10 Maret 2019.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan\\_Pembangunan\\_Berkelanjutan](https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Berkelanjutan), Diakses pada 10 Maret 2019.

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-nilai-nilai-islam-sejalan-dengan-sdg/>, Diakses tanggal 11 Maret 2019.